

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) LUWU TIMUR DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR
(Studi Kasus Masyarkat Pesisir di Kecamatan Wotu)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Syariah Prodi
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institit Agama Islam
Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

**RISTA
NIM. 15 0401 0066**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
TAHUN 2019**

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) LUWU TIMUR DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR
(Studi Kasus Masyarkat Pesisir di Kecamatan Wotu)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Syariah Prodi
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institit Agama Islam
Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

**RISTA
NIM. 15 0401 0066**

Dibimbing Oleh;

1. Dr. Takdir, SH., M.H.
2. Ilham, S.Ag., MA.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
TAHUN 2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Masyarakat Pesisir di Kecamatan Wotu)”** yang ditulis oleh **Rista, NIM. 15 0401 0066** Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari **Jum’at**, tanggal **20 September 2019 M.** bertepatan dengan **20 Muharram 1441 H.** telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Palopo, 01 Oktober 2019 M
02 Shafar 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Burhan Rifuddin, S.E., M.M | Penguji I | (.....) |
| 4. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Ilham, S.Ag., M.A. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Dr. Fasiha, M.El.
NIP. 19810213 200604 2 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rista
NIM : 15.0401.0066
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 6 September 2019

Yang membuat pernyataan



Rista
Rista
15.0401.0066

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 6 September 2019

Yth.

Di-

Palopo

Assalamu' Alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rista

NIM : 15.0401.0066

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

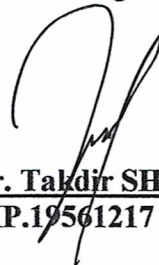
Judul : **Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Study Kasus di Kecamatan Wotu).**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diujikan di Ujian *Munaqasyah* untuk proses selanjutnya.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Takdir SH., M.H
NIP.19561217 198303 1 011

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 6 September 2019

Yth.

Di-

Palopo

Assalamu' Alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rista

NIM : 15.0401.0066

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

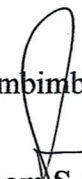
Judul : **Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Study Kasus di Kecamatan Wotu).**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diujikan di Ujian *Munaqasyah* untuk proses selanjutnya.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum Wr.Wb.

Pembimbing II


Ilham S. Ag. M.A
NIP. 19731011 200312 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **“Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Study Kasus di Kecamatan Wotu).”**.

Yang ditulis oleh:


Nama : Rista
Nim : 15.0401.0066
Program studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diajukan pada Ujian *Munaqasyah*.


Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 6 September 2019

Pembimbing I


Dr. Takdir SH., M.H
NIP. 19561217 198303 1 011

Pembimbing II


Ilham S.Ag. M.A
NIP. 19731011 200312 1 003

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Palopo, 6 September 2019

Yth.

Di-

Palopo

Assalamu' Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rista

NIM : 15.0401.0066

Fakultas : EkonomidanBisnis Islam

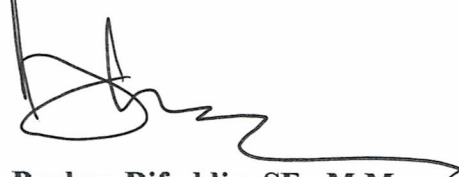
Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : **Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Study Kasus di Kecamatan Wotu).**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diujikan di Ujian *Munaqasyah* untuk proses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum Wr. Wb.

Penguji I



Burhan Rifuddin, SE., M.M
NIP. 19670311 199803 1 001

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Palopo, 6 September 2019

Yth.

Di-

Palopo

Assalamu' Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rista

NIM : 15.0401.0066

Fakultas : EkonomidanBisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : **Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Study Kasus di Kecamatan Wotu).**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diujikan di Ujian *Munaqasyah* untuk proses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum Wr. Wb.

Penguji II



Muzayyanah Jabani S.,T M.M
NIP. 19750104 200501 2 003

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi dengan judul: **“Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Study Kasus di Kecamatan Wotu).”**

Yang dituliseleh:

Nama : Rista
Nim : 15.0401.0066
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diajukan pada Ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 6 September 2019

Penguji I



Burhan Rifuddin, SE., M.M
NIP.19670311 199803 1 001

Penguji II



Muzayyanah Jabani S., T M.M
NIP.19750104 200501 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam selaku para pengikutnya, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berada di jalannya. Di mana Nabi yang terakhir di utus oleh Allah SWT. Di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Dalam proses penyusunan penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Abd. Rahman dan Ibunda Patiana yang tak henti-hentinya memberikan do'a, motivasi, kasih sayang dan segala kebaikan yang tak mampu penulis tukarkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Tak lupa kakak saya Rika Rahim dan adik saya Risal Abd. rahman dan Afgan Abd.rahman yang tiada hentinya

memberikan saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga penulis banyak terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar S.E., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Rahmlah Makkulasse, M.M. Bapak Dr. Muh. Ruslan Abdullah. S.E.I., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan keuangan, Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama. Ketua Program studi Ekonomi Syariah, Dr. Fasiha, M.E.I. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Takdir, S.,H. M.H. selaku pembimbing I dan Ilham, S.Ag. M.A. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Burhan Rifuddin, SE.,M.M selaku penguji I dan Muzayyanah Jabani S.,T M.M selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan koreksian kepada peneliti guna menyempurnakan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen IAIN Palopo yang sejak awal perkuliahan telah membimbing dan memberi pengetahuan kepada peneliti.
6. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Dr. Fasiha, M.EI beserta staf dosen IAIN Palopo yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan yang berharga.
7. Kepada staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang telah memberikan layanan yang baik sehingga peneliti bisa sampai ke tahap ini.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Sulfiani, S. Pd., M.Pd, beserta stafnya yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dalam pembahasan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Febi) angkatan 2015 (khususnya di kelas Ekis B), yang selama ini selalu memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
10. Kepada sahabat Cempren, Rismawati M, Fikryyah, Ulfa Arianti Sahrur, Hernita, Ayu Adellah, dan Faradiba Adhe Iswara Jaya, saya ucapkan banyak terima kasih yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada teman-teman saudara (i) KKN AngkatanXXXIV tahun 2018, terutama posko Desa Mangalle telah banyak memberikan motivasi kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Kepada sahabat Pa Cappu Berre, Sriumsiani ,Rismawati M, Hermi,Kalsum, saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya selama ini dan selalu memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman Muthmainna Munir, Nining Wahyuni, Rismayanti, Sriyanti, Junita Amir terima kasih telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Seluruh Pegawai Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Luwu Timur, terima kasih telah menerima dan membantu dalam menyelesaikan hasil penelitian ini.
15. Kepada Masyarakat pesisir di Kecamatan Wotu, terima kasih atas Partisipasinya telah membantu menyelesaikan penelitian ini

Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat dan segala partisipasi semua pihak yang tidak sempat tertuang namanya dalam skripsi ini mendapat imbalan yang berlipat ganda di sisi Allah Swt,Amin.

Palopo, 6 September 2019

Rista

NIM: 15.0401.0066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS PENGUJI	vi
PERSETUJUAN PENGUJI	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
PRAKATA	ix
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Pengertian Upaya Pemerintah.....	13
2. Kesejahteraan.....	15
3. Pengertian Masyarakat Pesisir	17
4. Pemberdayaan Masyarakat	21

C. Kerangka Berfikir	23
----------------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN24

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	24
B. Jenis dan sumber data.....	25
C. Lokasi Penelitian	25
D. Subjek Penelitian.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data.....	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....29

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Pembahasan Hasil Penelitian	50
1. Upayah Pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir	56
2. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Rista 2019.

Upaya Pemerintah Daerah Luwu Timur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Di Kecamatan Wotu.

(Pembimbing I: Dr. Takdir, SH., MH. Pembimbing II: Ilham, S.ag., M.A)

Kata Kunci: Upaya Pemerintah, Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Permasalahan dalam Penelitian ini yaitu melihat potensi yang ada disekitar pesisir yang dapat dimanfaatkan masyarakat disekitar pesisir yang identik dengan mencari ikan atau nelayan yang dimana masyarakat pesisir ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah agar masyarakat pesisir jauh dari keterbelakangan, kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini perlu tinjauan tentang bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Luwu Timur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Wotu, serta kendala apa saja yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir..

Metode penelitian yang digunakan adalah yaitu metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, yang diperoleh dari wawancara langsung kepada informan dan observasi. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan metode Reduksi Data, Triangulasi dan Menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa (1) pengembangan potensi perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Luwu Timur melalui Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil perikanan dan kelautan guna untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus pendapatan masyarakat pesisir, serta dukungan sarana dan prasarana hasil tangkap nelayan. (2) adapun kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yaitu keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan nilai religius yang masih sangat dipercayai oleh masyarakat pesisir.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang memiliki potensi alam yang dapat bermanfaat sehingga menjadi suatu nilai guna dan dapat bersaing dengan negara berkembang lainnya. Sebagian besar daerah Indonesia yaitu terdiri dari lautan dan mempunyai potensi kelautan cukup besar, dalam konteks wilayah laut terdapat suatu daerah yang biasa disebut daerah pesisir dimana daerah pesisir ini merupakan bertemunya antara darat dan laut, kearah darat mencakup wilayah daratan, baik darat maupun laut, yang sangat berpengaruh keadaan laut misalnya pasang surut dan angin laut. Dengan melihat kelebihan yang sudah ada disekitar pesisir perlu adanya perhatian pemerintah untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan mensejahterakan kehidupan rakyat pesisir agar setara dengan masyarakat yang tinggal dikota.

Pemerintah Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan kesejahteraan diantara rakyat, terkhusus rakyat pesisir menjadi kenyataan dalam mengembangkan pembangunan Indonesia. Selama ini perekonomian makro terlihat tumbuh bahkan di antara tumbuhnya itu menyembunyikan masalah agresif yang dapat menyebabkan masalah horizontal dan vertikal di antara negara. Pemerintah mengutamakan pembangunan investasi besar seperti pelabuhan, jalan, dermaga dan kawasan industri, namun kurang memberi perhatian yang lebih terhadap pembangunan masyarakat menengah ke bawah. Bahkan tumbuhnya perekonomian negara pula harus sejalan dengan tersedianya keinginan utama

dan bertambahnya pada masyarakat Indonesia sehingga setiap rakyat memperoleh memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kehidupan masyarakat nelayan yang kurang mampu dan dekatnya dengan laut menyebabkan tingginya suatu kerentanan pada kesehatan masyarakat nelayan. Jaminan kesehatan ialah pemerintah yaitu juga dibantunya pendapatan keluarga nelayan. Alokasi pengeluaran yang seharusnya digunakan untuk biaya kesehatan dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk kebutuhan hidup yang lain.

Pemerintah juga harusnya melihat secara langsung bagaimana kondisi masyarakat apakah layak atau tidak, dan juga pemerintah daerah harusnya memberikan kesempatan terhadap masyarakat nelayan untuk dapat meningkatkan perekonomiannya. Bantuan yang dapat diberikan pemerintah yaitu berupa alat tangkap nelayan kecil, pelatihan atau penyuluhan hasil produksi dan subsidi kebutuhan produksi ikan, serta penyediaan sarana dan prasarana.

Saat pemerintah ingin dijadikan Indonesia menjadi poros maritim Dunia, justru kurang memperhatikan masyarakat yang ada di sekeliling pesisir seperti nelayan yang cuma menjadi penonton di daerah sendiri. Produksi dari pendapaatan laut yang didapatkan nelayan sangatlah rendah ketika membandingkan dengan kelebihan sumber daya laut yang ada di lingkungan sekitarnya nelayan tersebut. Kebijakan tegas yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan upaya menindaklanjuti pengambilan ikan secara ilegal dan kecurangan laut lainnya yang belum cukup guna kembalinya harga diri negara upaya rakyat bahari dan maritim.

Kebijakan ini seharusnya dilaksanakan guna dari pemerintahan untuk meningkatkan daya saing antara rakyat pesisir, terkhusus nelayan sehingga pengelolaan daerah pesisir dan laut dapat dilakukan bersama-sama.

Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi saat ini diprioritaskan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Namun, tidak hanya itu mengambil kebijakan ekonomi, salah satu hal yang mendasari yang secepatnya dikerjakan pemerintah adalah pendidikan rakyat pesisir.

Pendidikan mempunyai perannya yang sentral sebab pada setiap negara bersaing dalam mempersiapkan pekerjaan yang baik, mempunyai kemampuan yang memiliki keterampilan dan berpendidikan. Memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan dilingkungan rakyat nelayan yang akan memacunya meningkatnya berkualitas SDM nelayan. Pendidikan yang telah diberikan merupakan pendidikan umum bahkan meningkatkan keterampilan nelayan dalam penangkapan hasil laut.

Berpotensinya yang ada dan dapat dimanfaatkan masyarakat tentu perlu adanya perhatian pemerintah daerah untuk mengembangkan masyarakat pesisir yang identik dengan mencari ikan atau nelayan. Dengan dimanfaatkannya sumber daya pesisir dan laut dengan intensifnya, optimalisasi dan dikendalikan akan mendorong adanya peningkatan ekonomi dalam daerah yang tingginya serta memperoleh diberikanya efek untungnya yang besar suatu sejahteranya rakyat pesisir.

Namun pada kenyataanya hanya sebagian wilayah yang menjadi prioritas pemerintah sehingga sampai saat ini dapat dilihat banyak masyarakat pesisir yang masih berada dibawa garis kemiskinan. Salah satu daerah pesisir yang dapat dimanfaatkan yaitu Pelabuhan Wotu. Wotu adalah daerah kecamatan yang terdapat di kabupaten Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan, dimana daerah wotu ini terdapat beberapa adat dan suku seperti suku bugis, toraja dan yang lainnya, meski banyak perbedaan suku dan adat kehidupan masyarakat wotu tidak berpengaruh dengan hal itu. Adapun pekerjaan masyarakat atau aktivitas sehari-hari masyarakat wotu pada umumnya seperti yang ada di daerah lainya yaitu bertani, berkebun, dan nelayan. Berbicara tentang nelayan tentunya berdominan terhadap masyarakat yang hidup di pinggiran laut atau yang biasa di sebut masyarakat pesisir.

Seperti masyarakat daerah pelabuhan wotu yang diduduki oleh masyarakat pesisir. Seperti aktivitas manusia biasanya masyarakat bekerja pada pagi hari atau sore hari. Hal yang memprihatinkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir dalam hal pembangunan di sekitar masyarakat yang dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat pesisir di pelabuhan wotu. Membangun sumber daya laut pada waktu ini menjadi perhatian untuk pemulihan ekonomi rakyat pesisir dengan melihat potensi alam dan dapat dimanfaatkan masyarakat dapat menunjang dan menambah pendapatan masyarakat dan menambah taraf hidup.

Sehubungan hal ini tentu pemerintah daerah sangat berperan aktif dalam segala bentuk aspek yang menunjang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir maupun itu eksternal ataupun internal.

Pesisir biasanya identik dengan nelayan, tetapi dipelabuhan wotu bukan hanya nelayan yang bisa di manfaatkan masyarakat masih banyak sumber daya alam yang bisa di manfaatkan tapi dengan kurangnya sarana dan prasarana dari pemerintah setempat masyarakat hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut seperti menangkap ikan lalu di jual dan mendapatkan penghasilan yang tidak seberapa. Tentunya dengan hal di atas pemerintah bisa menole sedikit ke belakang untuk melihat apa yang terjadi dengan masyarakat pesisir, upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir sangat dibutuhkan karena sampe saat ini peran pemerintah masih sedikit kurang. Pendapatan atau penghasilan yang diterima masyarakat pesisir dari hasil laut hanya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari keluarga saja, untuk itu perlu adanya perhatian dan peningkatan dan dukungan pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat pelabuhan wotu .

Dengan melihat keadaan diatas tentu perlu adanya pandangan islam yang lebih jelasnya dalam ekonomi islam kesetaraan taraf hidup sangat penting karena tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Oleh karenanya itu ayat dibawah akan menjelaskan tentang kesetaraan hidup.

Q.S al-Baqarah /2:164.¹

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-nya bumi setelah mati (kering), dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.

Islam mengajarkan manusia agar menjalankan hidup sesuai dengan syariat agama islam dengan mengarahkan perekonomian Indonesia yang berlandaskan Alquran.

Suatu tantangan besar bagi ummat islam adalah bagaimana membangun ekonomi yang selaras dengan idiologi Islam.

Berdasarkan asumsi, pertimbanganya dan alasan yang ada pada latar belakang masalah diatas telah mendorong penulis untuk mengetahui dan memahami upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di pelabuhan wotu sebagai pokok pembahasan penulis dengan mengambil judul” “Upaya Pemerintah Daerah Luwu Timur Dalam Meningkatkan

¹ “KementrianAgama Republik Indonesia, “Al-quran dan Terjemahnya”, (Jakarta, pustika Amani Jakarta:2005).h.31

Kesejahteraan Masyarakat Pesisir” dengan studi kasus di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah (PEMDA) Luwu Timur dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di Kecamatan Wotu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah (PEMDA) daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di kecamatan Wotu

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui Strategi Pemerintah Daerah (PEMDA) Luwu Timur dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Wotu
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah (PEMDA) Luwu Timur dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Wotu

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhususnya dalam ilmu.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pemerintah daerah dan sebagai masukan dalam melihat serta mengelolah potensi-potensi daerah khusunya wilayah pesisir yang selama ini masih terbelakang serta bergantung pada kondisi alam semata.

3. Manfaat Teoritis, dapat dijadikan sumber informasi tentang upaya pemerintah daerah (PEMDA) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat terkhususnya pada wilayah pesisir .

E. *Defenisi Operasional Variabel*

Skripsi ini berjudul “ Upaya Pemerintah Daerah (PEMDA) Luwu Timur Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pesisir di Pelabuhan Wotu” maka sangat penting untuk membahas definisi operasional variabel agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dan untuk memudahkan penelitian.

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan atau memecahkan suatu persoalan dan mencari jalan keluar.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi tugas dan bantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membagi wilayah, perancangan pembangunan serta mengembangkan otonomi daerah.

Masyarakat Pesisir adalah ²Sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama mendiami wilayah yang dekat dengan laut yang biasa dikenal dengan pesisir

²Yeni Kuntari. “ Kajian Multi Disiplin ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat” .(cet.1;STIE WidyaMangalaSemarang,2017),h.1.

membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungan mereka pada pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan pesisir. Kenyataannya pembangunan kelautan dan perikanan selalu diposisikan sebagai sektor yang dipinggirkan (*peripheral sector*) dalam pembangunan ekonomi nasional dan diperparah program pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir belumlah tergarap, kawasan dinamis yang sangat strategis untuk mengembangkan berbagai sektor usaha.

Kesejahteraan merupakan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya,³ kondisi terterpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu menyelamatkan, menyejahterakan, hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman. Badan pusat statistik indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non-pangan, kesehatan serta fasilitas lainnya.

Kesejahteraan adalah suatu keadaan dimana manusia atau orangya merasakan kebahagiaan, makmur dan memiliki kecukupan di dalam hidupnya.

³ Chalid, Nursiah dan yusbar Yusuf. 2014. *Pengaruh Tingkat Kemiskinan, tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau*. Jurnal Ekonomi Universitas Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah segala macam rujukan dalam penulisan yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan baik itu variabel ataupun obyek dan subyek penelitiannya, untuk memudahkan penyusunan dan melihat apakah ada perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Hasil meneliti yang telah dilakukan oleh Aliza Noor Fathoni dengan judul “Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan Studi Kasus pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap” dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mencoba untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan, dimana strategi yang digunakan disini ada dua yaitu strategi dalam meningkatkan pendapatan nelayan dan strategi dalam meningkatkan pendapatan nelayan dalam perspektif ekonomi islam. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan wawancara di lapangan kepada para informan penelitian. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu pencatatan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada. Produser penelitian kualitatif dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan serta verifikasi data. Hasil penelitian yaitu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melakukan berbagai strategi dengan memfasilitasi berbagai

sarana dan menerbitkan sertifikat tanah, sedangkan dalam perspektif Islam strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nelayan merupakan bentuk tanggung jawab pemimpin terhadap kesejahteraan rakyatnya dimana kebijakan pemerintah tersebut merupakan kebijakan yang mengandung masalah.¹

Perbedaan dari peneliti adalah peneliti menggunakan judul “Upaya Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu” untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.

Persamaan penelitian yang sudah dilakukan dan peneliti lakukan adalah lokasi penelitian yang berbeda.

Hasil penelitian yang didapatkan oleh Sarjulis dengan judul “Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam” Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mencoba untuk menjelaskan kehidupan sosial ekonomi nelayan di kabupaten Agam. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu *Hauristik* mencari dan mengumpulkan sumber, *Kritik* yang dibagi atas kritik intern dan ekstern, *Interpretasi* yakni menetapkan makna dan saling keterkaitan hubungan dari fakta yang telah diperoleh, *Historiografi* yaitu bentuk penyampaian berupa penulisan kembali. Hasil penelitian yaitu keadaan sosial masyarakat nelayan yang ada di

¹Aliza Noor Fathoni “ *Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan Studi Kasus pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap*” jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Purwokerto, 2015

Kabupaten Agam tidak jauh beda dengan nelayan lain yang ada di kota padang yaitu tergolong miskin.²

Perbedaan dari peneliti adalah peneliti menggunakan judul “Upaya Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam peningkatan pendapatan masyarakat pesisir” disini peneliti ingin mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Persamaan penelitian yang telah dilakukan dan peneliti lakukan adalah meningkatkan kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Zulfiani yang berjudul “Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar”. Penelitian ini menjelaskan tentang analisis pemerintah daerah polewali mandar dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian yaitu membuktikan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan dikecamatan polewali telah dilaksanakan secara utuh sesuai dengan peraturan yang berlaku.³

Perbedaan dari peneliti adalah peneliti menggunakan judul “Upaya Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu” disini peneliti ingin mengetahui

²Sarjulis ”*Kehidupan sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam*” jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Andalas, 2011

³Zulfiani, “*Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar*” jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, 2015

bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

Persamaan penelitian yang sudah dilakukan dan yang peneliti lakukan adalah objek penelitiannya yaitu masyarakat pesisir.

B. *Tinjauan pustaka*

1. Upaya pemerintah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata upaya berarti usaha, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan suatu masalah, mencari solusi dari masalah tersebut. Berdasarkan makna dalam kamus besar Bahasa Indonesia itu, dapat disimpulkan bahwa kata upaya memiliki kesamaan arti dengan kata usaha, dan demikian dengan kata ikhtiar, dan upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.

Adapun arti upaya dalam ⁴kamus Etimologi yaitu yang mendekati atau bertujuan guna mencapai suatu tujuan. Sedangkan di buku lain menjelaskan bahwa arti upaya yaitu suatu usaha, akal atau bersabar untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan masalah, dan mencari solusi.

Adapun dengan kata pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Dan juga sebagai sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, suatu negara atau bagian-bagiannya. ⁵Pemerintah adalah alat bagi negara dalam

⁴Kamus Etimologi Bahasa Indonesia, (Semarang: Dahara Prize, 1990), h. 177.

⁵Kusnardi, Moch. Dan Saragih, R. Bintan, 2008, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga, dalam mewujudkan segala kepentingan yang telah ditetapkan.

Pemerintah adalah pelayanan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun ketentuan melayani masyarakat adalah memberikan layanan terhadap masyarakat dan memberikan layanan umum tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelayanan umum yaitu transparansi, perhitungan, kondisi, kerja sama, hak yang sama, dan kerataan hak dan kewajiban.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintah daerah adalah pelaksana urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi serta kewajiban dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki hak dan wewenang daerah otonom. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai bentuk

penyelenggaraan pemerintah daerah.⁶ Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah suatu hal yang dilakukan dalam membentuk otonomi daerah sebagai suatu kewajiban, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengolah dan mengurus sendiri urusan daerah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kesejahteraan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Kesejahteraan ialah keselamatan, ketentraman, keamanan dan kemakmuran.⁷ Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan social adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materi maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.⁸ Konsep kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas dibandingkan sekedar mengukur aspek pendapatan nominal. Kesejahteraan adalah *standard living, well being, welfare, dan quality of life*. Kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup antara lain, kesejahteraan materi, kesejahteraan bermasyarakat, kesejahteraan emosi dan

⁶Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 185

⁸Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia Bab 1 Pasal .

keamanan.⁹ Konsep kesejahteraan sangat erat kaitanya dengan keringana sosial (*social policy*) yang banyak merampung langkah dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang utama melalui melindungi social (*sosial protection*) yang mencakup jaminan social baik dalam bantuan social dana jaminan sosial, maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*). Sekurang-kurangnya ada lima bagian petama yang disebut Spicker untuk dijelaskan konsep kesejahteraan, yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial.¹⁰ Menurut kamus W.J.S Poerwadarminta sejahtera di artikan sebagai keadaan “aman, sentosa, dan makmur”. Sehingga arti kesejahteraan meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Adapun istilah rakyat (sosial) dalam arti sempit berkaitan dengan sector pembangunan social atau membangun kemakmuran rakyat yang memiliki tujuan untuk peningkatan mutu kehidupan masyarakat , yang utama dikelompokkan dalam sekelompok yang kurang beruntung dan kelompok rentan (kelompok yang dikategorikan orang miskin). Dalam hal ini, keutamaan pembangunan untuk kemakmuran masyarakat pada ketentuannya terkait program-program atau layana social untuk mengatasi masalah-masalah social seperti, kemiskinan dan keterlantaran.¹¹

Istilah kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti, yakni dalam istilah umum, sejahtera menunjuk kekeadaan manusia yang baik, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, Dalam

⁹Adi, IsbandiRukminto 2015.*KesejahteraanSosial*. (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada)

¹⁰Suharto, Edi. 2005. *AnalisisKebijakanPublik*. Alfabeta. Bandung

¹¹Purwadarminta, W.J.S. 1990. *KamusBesarBahasa Indonesia*, Jakarta: DepartemenPendidikandanKebudayaan.

tinjauan ekonomi sejahtera selalu dihubungkan dengan keuntungan atau manfaat kebendaan (ukuran materi) sebagai fungsi kesejahteraan sosial, dalam tinjauan kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk kejangkauan melayani dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam tinjauan lain seperti keadaan kebijakan di Negara maju kemakmuran menunjuk bagian keuangan yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kebutuhan, namun tidak dapat bekerja.¹² Kesejahteraan merupakan hal yang baik secara keadaan sosial yang orang-orang sudah merasa terpenuhi seperti kemakmuran, sehat dan merasakan kedamaian didalam hidupnya.

3. Masyarakat Pesisir

Masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep yaitu

- a. Masyarakat sebagai sebuah tempat bersama yakni sebuah wilayah geografi yang sama
- b. Masyarakat sebagai kepentingan bersama yakni kesamaan berdasarkan kebudayaan dan identitas.¹³

Masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yaitu sudut struktural dan sudut dinamikanya. Segi struktural dinamakan pada struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial serta lapisan-lapisan sosial. Yang dimaksud dengan dinamika masyarakat adalah apa yang disebut sebagai pengaruh

¹²AgusSuryono. 2014. "*KebijakanPublikUntukKesejahteraanRakyat*". UniversitasBrawijaya

¹³Suharto, Edi. 2005. "*Memangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*". Bandung.PT. Refika Aditama

sosial dan perubahan-perubahan sosial. Proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Dengan kata lain, proses sosial adalah cara hubungan yang bisa dilihat apabila seseorang atau kelompok manusia saling berinteraksi dan memilih sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang terjadi apabila ada berubah yang mengakibatkan runtuhnya cara hidup yang sudah ada.

Menurut pedoman umum Departemen Kelautan dan Perikanan dalam rancangan Undang-Undang mengelolah wilayah pesisir terpadu mendefinisikan wilayah pesisir daerah peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut yang terletak diantara batas sempadan kearah darat sejauh pasang tertinggi kearah laut.

Masyarakat pesisir adalah sekelompok warga yang tinggal di daerah pesisir yang tinggal bersama dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber daya di wilayah pesisir. Masyarakat yang hidup di kota-kota atau daerah pesisir mempunyai karakter secara sosial ekonomis sangat terkait dengan sumber perekonomian dari wilayah¹⁴.

Demikian pula dengan mata pencaharian yang memanfaatkan sumber daya alam atau memanfaatkan lingkungan yang ada di wilayah pesisir seperti nelayan, petanirumput laut, dan pemilik atau pekerja yang industri maritim. Masyarakat pesisir yang lebih banyak melakukan usaha perikanan pada umumnya yang berada pada garis kemiskinan, mereka tidak memiliki pilihan pekerjaan, masih rendahnya pendidikan yang dimiliki, tidak mengetahui dan sadar

¹⁴Prianto, E. 2005. *Proseding "Fenomena Aktual Tema Doktoral Arsitektur dan perkotaan"*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

kelestarian sumber daya alam dan lingkungan¹⁵. Selanjutnya dari status keaslian daerah, karakteristik beberapa daerah tempat tinggal di daerah pesisir umumnya tidak memiliki status hukum (legalitas), terutama area yang direklamasi secara swadaya oleh masyarakat.¹⁶

Wilayah pesisir diartikan sebagai wilayah daratan yang memiliki batasan dengan laut, batas di daratan meliputi daerah-daerah yang terkena air maupun yang tidak terkena air yang sangat mempengaruhi proses laut seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi garam, sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan¹⁷.

Lingkungan alam sekitar akan membentuk sifat dan perilaku masyarakat. Lingkungan fisik dan biologi mempengaruhi komunikasi sosial, penyaluran peran sosial, karakteristik nilai, norma sosial, etika serta pendapat yang berorganisasi dalam masyarakat. Dikatakannya pula berubahnya lingkungan dapat merubah konsep keluarga. Nilai-nilai sosial yang berkembang dari hasil penafsiran atas manfaat dan fungsi lingkungan dapat memacu mengubah sosial¹⁸. Masyarakat kawasan pesisir menonjol agresif, dikemukakan oleh Suharti karena

¹⁵Lewaherilla, N., E. 2002. *Pariwisata Bahari Sebagai; Pemanfaatan Potensi Wilayah Pesisir dan Lautan*.

¹⁶Suprijanto, I 2006, "Karakteristik Spesifik, Permasalahan dan Potensi pengembangan kawasan Kota Tepi Laut/Pantai (Coastal City) di Indonesia.

¹⁷Bengen, D.G. 2001. *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor.

¹⁸Usman, Rachmadi. 2003. *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

kondisi lingkungan pesisir yang panas dan terbuka, keluarga nelayan mudah terpengaruh, dan salah satu kebiasaan yang sering di kalangan nelayan (masyarakat pesisir) adalah karena kemudahan mendapatkan uang menjadikan hidup mereka lebih konsumtif.

Berbagai masalah sosial dalam mengelolah lingkungan sosial antara lain: perkembangan masalah atau friksi sosial, tidak meratanya jalan sosial ekonomi, meningkatnya jumlah pengangguran, peningkatan angka kemiskinan, meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi, kesenjangan akses pengelolaan sumberdaya, meningkatnya gaya hidup (konsumtif), kurangnya perlindungan pada hak-hak masyarakat lokal/tradisional dan modal sosial, perubahan nilai, pudarnya adat, melemahnya kontrol sosial, berubahnya dinamika penduduk, masalah kesehatan dan rusaknya lingkungan¹⁹.

Masyarakat pesisir yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah mereka yang hidup dan tinggal di daerah pesisir dan laut. Secara khusus masyarakat pesisir yang dimaksudkan dalam pernyataan ini ialah masyarakat nelayan tradisional yang tidak memiliki ketidak berdayaanya dalam segala hal, baik materi, pendidikan, maupun teknologi menjadikan mereka kurang mampu dan keterbelakangan.²⁰

¹⁹Purba, J. 2002 *Pengelolaan Lingkungan Sosial* : Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

²⁰Supriharyono 2007, "*Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*", *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta

4. Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang hadir sebagai bagian dari pengembangan alam pikiran rakyat dan kebudayaan barat utama Eropa. Untuk mengetahui konsep *empowerment* secara cepat dan tepat diperlukan rencana pemahaman latar belakang secara tertata yang melahirkannya.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuatan atau kekuasaan)²¹.

Pemberdayaan adalah usaha untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan keahlian yang dimiliki dan mengupayakan untuk pengembangan potensi itu menjadi aksi nyata.²²

pemberdayaan masyarakat adalah “usaha menyiapkan masyarakat sejalan dengan langkah mempererat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”.

pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kepedulian akan kelebihan yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.²³

²¹Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Refika Aditama, 2005.

²²Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), h.42.

²³Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996), h.145.

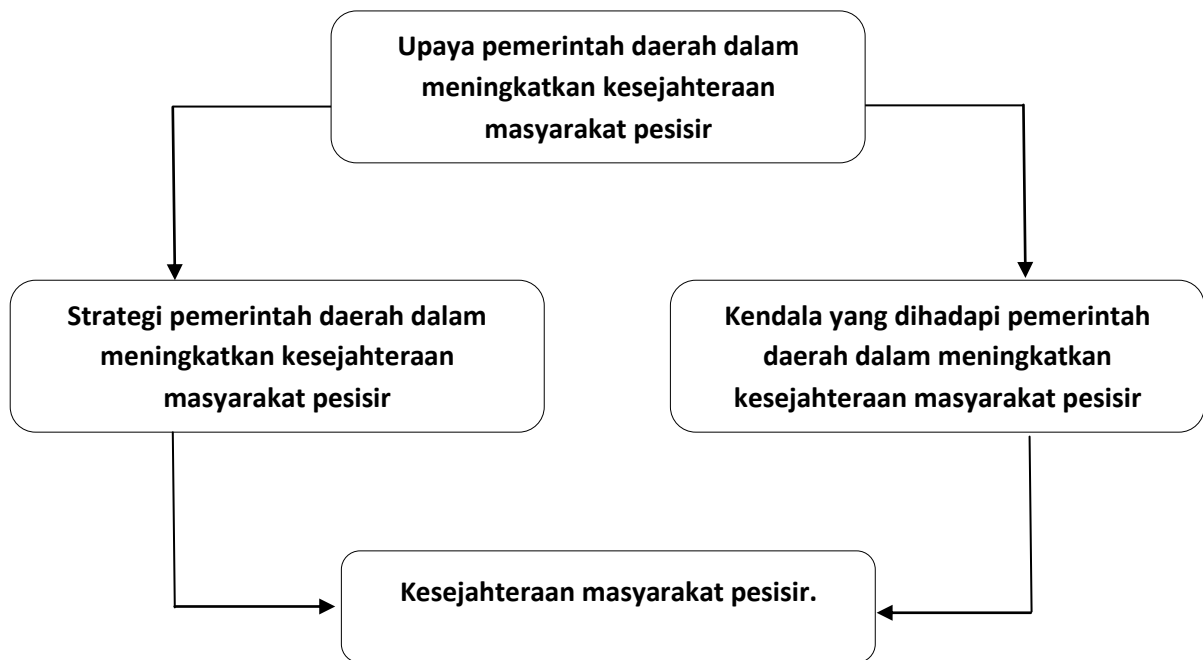
Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, bahwa suatu pemberdayaan (empowerment), pada intinya ditujukan guna²⁴ *“To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from environment to clients”* yang artinya Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakannya yang akan dia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.

Dari beberapa pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian ketrampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

²⁴Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h.77-78.

C. Kerangka Pikir

Untuk lebih memperjelas penelitian serta mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2:1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok. Dalam penelitian tersebut penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan nantinya itu adalah gambar dan kata-kata.

Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan lainnya. Peneliti-peneliti deskriptif kualitatif berupaya keras agar pembahasannya lebih cenderung kualitatif daripada kuantitatif dengan pendekatan kajian pada makna dan ketajaman analisis logis dan menjauhi pendekatan statistik¹. Peneliti deskriptif-kualitatif untuk meningkatkan pendapatan telah berupaya keras untuk mengkontuksi penelitiannya dengan berangkat dari suatu fenomena meningkatkan pendapatan, mengingat hasil akhir penelitian berujung pada pembuatan langkah-langkah strategis untuk pemecahan kasus, telah mengabaikan sifat penelitiannya belum “benar-benar” kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang akan diselidiki.

¹ Bungin. Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

1. Jenis data

Data yang digunakan tersebut menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian data yang diperoleh langsung dari sumbernya biasanya berupa wawancara yang akan diamati dan dicatat. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa informasi hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti informan, peneliti juga membutuhkan pengumpulan data dengan menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Pengumpulan data biasanya juga terdapat beberapa bagian dari integral dari suatu proses penelitian bisnis yang akan diteliti seringkali diperlukan untuk berbagai tujuan pengambilan keputusan.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperolehnya dari media perantara atau secara tidak langsung misalnya data yang diperoleh dari membaca buku-buku, literatur yang digunakan sebagai dasar untuk membuat landasan teori. Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi penunjang data primer seperti dengan foto-foto atau dokumentasi yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan peneliti melakukan penelitian ini

adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah luwu timur dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

3. Subjek Penelitian

Yaitu dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah pemerintah daerah dan masyarakat pesisir

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu :

a) Observasi

Observasi merupakan suatu proses atau objek yang dimasukkan untuk merasakan kemudian memahami pengetahuan serta gagasan yang ada atau sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan berbagai informasi-informasi untuk melanjutkan suatu penelitian nantinya. Format berisi tentang kejadian atau perilaku yang akan menggambarkan suatu kejadian. Selanjutnya pengamatan yang dilakukan adalah alat pengumpulan data yang akan dilakukan secara diamati dan dicatat sesuai hasil yang didapatkan.

b) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Adapun tujuan dari wawancara tersebut untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tepat sesuai apa yang narasumber sampaikan. Tugas dari pewawancara mengajukan pertanyaan kepada narasumber sedangkan tugas dari narasumber adalah menjawab dari pertanyaan pewawancara.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara seseorang yang melakukan berbagai moment biasanya dalam suatu kegiatan. Kemudian menyediakan dokumen-dokumen selain itu menyediakan bukti-bukti yang akurat dari sebuah pencatatan sumber-sumber informasi yang didapatkannya. Dokumentasi peneliti juga yang melakukannya ialah mengumpulkan bukti data-data dokumentasi seperti foto-foto saat meneliti kepada pemerintah daerah.²

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif yang menjelaskan menggambarkan, menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat jawaban terhadap apa yang dipermasalahkan. Dalam penelitian kualitatif mencakup hasil wawancara, reduksi data, analisis data dapat ditarik kesimpulannya. Berikut analisis data yang digunakan peneliti yaitu sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data biasanya merupakan suatu bentuk analisisnya selalu mengarahkan, menggolongkan dan membuang yang tidak perlu sehingga dapat dibuatkan kesimpulan.

b) Triangulasi

Dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu sebagai mengecek keabsahan data, yang memanfaatkan sesuatu dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

²Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 83.

c) Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan dan Verifikasi ketika kegiatan pengumpulan data sedang dilakukan, seorang penganalisis kualitatif harus mencari pola-pola, penjelasan, mencatat keteraturan dan alur sebab-akibat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Lokasi Penelitian*

1) **Letak geografis**

Kecamatan wotu merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayahnya adalah 130,52 km² , atau meliputi 1,88 persen dari luas sulawesi selatan . Secara geografis kecamatan wotu terletak disebelah barat ibu kota Kabupaten Luwub Timur tepatnya terletak diantara 2⁰31'58"-2⁰39'57" Lintang Selatan dan 120⁰45'20"-120⁰55'38" Bujur Timur. Batas daerah Kecamatan Wotu adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tomoni.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Burau
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkona

Kecamatan wotu terdiri dari 12 desa yang seluruhnya berstatus desa definitive dengan 58 Dusun dan 177 RT. Sebagian wilayah kecamatan wotu merupakan daerah pesisir. 5 dari 16 desanya merupakan wilayah pantai dan 11 Desa merupakan wilayah bukan pantai. Secara tofografi wilayah Kecamatan Wotu merupakan wilayah datar, karena ke 16 desa merupakan daerah datar dan tidak ada yang tergolong daerah yang berbukit-bukit.¹

¹RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021,h.23

Kecamatan Wotu berjarak sekitar 513 km dari kota makassar ibu kota provinsi sulawesi selatan. Penduduk tradisional yang mendiami terdiri dari 2etnik besar yaitu wotu dan bugis, di samping etnik yang lain seperti makassar, jawa, lombok, sunda dan bali yang merupakan pendatang yang bermukin disana. Aktifitas ekonomi bergerak dibidang pertanian, perikanan, dan perdagangan. Dalam pergaulan masyarakatnya berlaku 2 bahasa pengantara yaitu bahasa wotu yang dituturkan oleh Orang Wotu asli dan bahasa Bugis. Pada jaman dahulu kala bahasa wotu adalah alat komunikasi pada sebagian daerah sulawesi selatan pada sepanjang pesisir teluk bone dan sebagian sulawesi tengah,dan sekitar buton tenggara.

2) Demografi

Kepadatan Penduduk Kecamatan Wotu tergolong tinggi yaitu sebanyak 40 orang per kilometer persegi, jauh berada di atas rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur yaitu sebanyak 40 orang per kilometer persegi. Desa yang padat penduduknya adalah desa lera 670 orang/km², sedang paling rendah adalah Desa Balo-Balo dengan kepadatan sebanyak 81 orang/km². Pada tahun 2014, jumlah penduduk di Kecamatan Wotu Sebanyak 30.396 jiwa yang terbagi kedalam 6.886 rumah tangga, dengan rata-rata penduduk dalam 1 rumah tangga sebanyak 4 orang. Rasio jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dengan laki-laki, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 15.309 orang dan perempuan sebanyak 15.087 sehingga rasio jenis kelaminnya sebesar 101 yang artinya 100 wanita terdapat 101 orang laki-laki.

3) Visi dan Misi Kecamatan Wotu

Kecamatan Wotu adalah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, tentulah membutuhkan strategi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, sehingga disemua bidang pemerintahan dan pembangunan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan diinginkan. Maka untuk menjelas suatu strategi demi terwujudnya pembangunan, arah pembangunan itu harus di rumuskan dalam suatu bentuk visi dan misi sebagai cita-cita dan harapan yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu, supaya roda pemerintaha dan pelaksanaan pembangunan perarah dengan baik. Adapun yang menjadi visi dan misi Kecamatan Wotu, adalah:

Visi dari Kecamatan Wotu adalah mewujudkan prima dalam membentuk masyarakat yang produktif, mandiri dan sejahtera yang dilandasi dengan profesionalisme dan kepribadian yang kokoh.

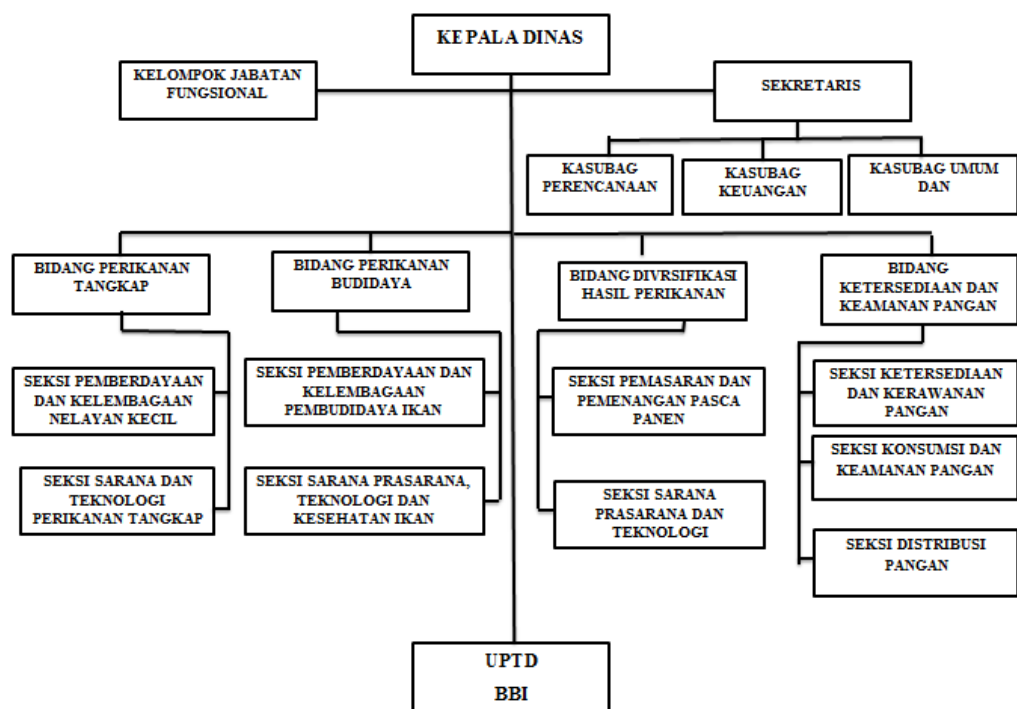
Adapun misi kantor Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya masyarakat yang kompoten dan harmonis, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, kebebasan berserikat.
2. Terwujudnya masyarakat yang kompoten dan penduduk yang terarah dan terkendali.

3. Meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan dan pelayanan perekonomian, ketentraman dan ketertiban, dalam pembangunan masyarakat pedesaan.

4) Gambaran umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur

Tugas dan Kewajiban, Fungsi dan uraian Tugas jabatan-jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.



Gambar 4:2

Kepala Dinas

Tugas dan kewajiban melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kelautan dan perikanan .

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan dinas
- b. Perencanaan strategi
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan. Program dan kegiatan dinas
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas

Uraian Tugas

- a. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang kehutanan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Menyusun kebijakan-kebijakan dibidang kelautan dan perikanan.
- c. Merekomendasi izin dan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan.
- d. Merencanakan pembinaan teknis dibidang kelautan dan perikanan.
- e. Mengawasi, membina dan mengendalikan sumber daya alam, jasa kelautan dan perikanan.
- f. Mengedalikan dan mengawasi pengolahan pesisir dan pulau kecil, eksploitasi dan eksplorasi kelautan, rehabilitas ekosistem pesisir dan pulau kecil
- g. Mengawasi produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengembangan produksi perikanan.
- h. Mengawasi, mengajarkan dan menyediakan pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan serta memberikan modal dan investasi perikanan.

- i. Mengawasi pemanfaatan dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
- j. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan kegiatan program dan kegiatan dinas kelautan dan perikanan kepada bupati, melalui sekretaris daerah.

Sekretaris Dinas

Tugas dan kewajiban membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan layanan administrasi perencanaan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi aset, program/kegiatan dan pengembangan dibidang kelautan dan perikanan serta pembinaan organisasi.

Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga.
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian.
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

Uraian Tugas

- a. Merencanakan pengerjaan kerja Sekretariat Dinas berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
- b. Mengkoordinasi seluruh kegiatan antara bidang dalam lingkup dinas.
- c. Mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi dinas.

- d. Memberi arahan menganalisa dan mengembangkan kinerja dinas.
- e. Mengatur penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan mengendalikan, mengulang dan laporan kegiatan dinas.
- f. Memberi arahan membina organisasi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur dinas.
- g. Mengatur kegiatan bidang usaha, keuangan, aset, merencanakan dan mengendalikan serta mendidik kepegawaian dinas.
- h. Mengatur tata naskah dinas dan rumah tangga dinas.
- i. Melaksanakan inventarisasi semua benda bergerak dan tidak bergerak milik dinas.
- j. Memberi arahan pemeliharaan pengamanan dan ketertiban pada lingkungan dinas.
- k. Mengatur perpustakaan dinas.
- l. Mengatur dan menunjuk kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan. .

Kepala Subag Perencanaan

Tugas dan Kewajiban membantu Sekretaris dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian data, pembinaan dan evaluasi program / kegiatan dinas.

Fungsi

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian.

Uraian Tugas

- a. Perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang ada sebagai panutan kerja.
- b. Merangkum dan memahami aturan perundang – undangan, kebijakan teknis, tujuan serta lainnya yang menghubungkan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan.
- c. Merangkum dan mempersiapkan tujuan secara keseluruhan untuk penyusunan perencanaan aktivitas dinas.
- d. Memfasilitasi kegiatan koordinator dengan bagian dan bidang lainnya untuk menyediakan alat untuk menyusun strategi stratejik dinas.
- e. Mempersiapkan susunan kegiatan kerja tahunan secara periodik.
- f. Mempersiapkan susunan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) dinas.
- g. Menyediakan dan menyusun alat dalam mengendalikan aktivitas dinas.
- h. Melaksanakan monitoring kepada pkegiatan program/kegiatan dinas serta mempersiapkan tindak lanjut hasil monitoring.
- i. Menyediakan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat Kabupaten dan Propinsi.

- j. Mempersiapkan alat evaluasi melaksanakan kegiatan dinas dan menyusun LAKIP dinas.
- k. Mengatur dan menunjuk kegiatan tugas staf Sub Bagian Perencanaan.

Kepala Subag Keuangan

Tugas dan Kewajiban membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

Fungsi

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian
- e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian

Uraian Tugas

- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan.

- c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan keuangan.
- d. melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monev anggaran, dan pelaporan keuangan serta aset dinas.
- f. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian.
- g. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian.
- h. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Keuangan.

Kepala Subag Umum dan Kepegawaian

Tugas dan Kewajiban membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinas

Fungsi

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian

Uraian Tugas

- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- b. Menghimpun dan mempelajari aturan undang–undang, kebijakan teknis, pedoman serta bahan lainnya yang memiliki hubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Terkumpulnya, mengolah informasi, menginventarisasi permasalahan serta melakukan terpecahnya masalah yang berkaitan dengan tugas- dan urusan umum serta kepegawaian;
- d. Memberikan pelayanan : naskah dinas, arsip, kepastakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- e. Memeberikan pelayanan keperluan dan kebutuhan disertai ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi, serta sarana kantor;
- f. Melakukan kepengurusan perjalanan dinas, kendaraan, keamanan kantor serta kenyamanan kerumah tanggaan yang lainnya;
- g. Melakukan usulan pengadaan, peningkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi dan memberhhentikan atau pensiun, serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
- h. Mempersiapkan alat koordinasi dan menunjuk teknis keperluan dan mengadakan sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;

- i. Mengatur dan mengarahkan tugas staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- j. Merangkum kegiatan dan tugas staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang perikanan budidaya

Fungsi

- a. Menyusun kebijakan teknis bidang
- b. Menyelenggarakan program dan kegiatan bidang
- c. Mengatur pengkoordinasian, mengendalikan, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang
- d. Melaksanakan kegiatan program dan tugas kepala seksi dan pegawai non struktural dalam lingkup bidang

Uraian Tugas

- a. Merencanakan kegiatan evaluasi perkembangan budidaya ikan dan pengadaan sarana prasarannya.
- b. Mengatur segala sesuatu secara teknis dan menggali pemberdayaan teknologi dalam budidaya perikanan.
- c. Penyusunan kegiatan bidang untuk perencanaan tindak lanjut.
- d. Menguji dan pengembangan kinerja bidang.

Kepala Seksi Teknologi Budidaya

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala dalam melakukan aktivitas perikanan budidaya dengan menggunakan teknologi budidaya.

Fungsi

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas

- a. Mengidentifikasi dan inventarisasi perkembangan budidaya ikan.
- b. Menjalankan pembinaan kepada pembudidaya ikan yang meliputi mengembangkan intensifikasi pembudidayaan ikan (INBUDKAN) dengan memberdayakan teknologi budidaya..
- c. Menjalankan konsep pola umum dibimbing, membina dan mengawasi teknis pada Unit Pembinaan Rakyat (UPR) dan dunia usaha dan menyalurkan paket teknologi pembenihan dan penyusunana standar pembenihan perikanan.
- d. Memprioritaskan usaha keringanan dan restosking sumber daya perikanan.

- e. Menyediakan inventarisasi dan mengidentifikasi serta mencegah kepada penyebaran hama/penyakit ikan dengan pemberdayaan teknologi budidaya.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Dinas dalam pengembangan sarana dan prasarana

Fungsi

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas :

- a. Menyelidiki dan inventarisasi alat yang dibutuhkan dalam pengembangan budidaya ikan.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan budidaya ikan.
- c. Melakukan pembinaan pemberdayaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan budidaya ikan.

- d. Memproses efektivitas dan efisiensi menggunakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan budidaya ikan.

Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap :

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang

Uraian Tugas :

- a. Menyusun dan mengolah aktivitas pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan.
- b. Menunjuk kegiatan pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan.
- c. Mengatur kegiatan kelembagaan usaha perikanan.

- d. Mengarahkan teknis pelaksanaan aktivitas pengolahan hasil perikanan dan pasar hasil perikanan.
- e. Merangkum kegiatan program pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan.
- f. Melaporkan kegiatan di bidang kelembagaan usaha perikanan kepada kepala dinas.

Kepala Seksi Pengembangan Teknologi dan Perikanan Tangkap :

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi dan perikanan tangkap

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
- b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.

Uraian Tugas :

- a. Adanya penafsiran dan dugaan stok assement terhadap pemanfaatan potensi sumber daya perikanan tangkap.

- b. Membuat pola rancang bangun kapal perikanan dan alat tangkap kekayaan kapal perikanan.
- c. Mengoreksi, menganalisis dan pengembangan kegiatan kebutuhan sarana dan prasarana penangkapan ikan meliputi armada penangkapan maupun pelabuhan perikanan.
- d. Melaksanakan pembinaan teknis usaha menangkap ikan dan menyebarkan alat teknologi penangkap ikan .

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan :

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang Kelembagaan Usaha Perikanan dalam melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas :

- a. Mengolah serta perencanaan kegiatan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.
- b. Memberikan arahan izin dan pembinaan dalam aktivitas pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan. Mengelola inventarisasi pengolahan hasil perikanan.
- c. Melakukan aktivitas olahan hasil perikanan.
- e. Mengelola perkembangan dan memanfaatkan potensi alam laut bahari.

- f. Mengolah aktivitas pemasaran hasil perikanan.
- g. Membina teknis aktivitas kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian :

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan perizinan serta pelestarian dan konservasi di bidang kelautan dan perikanan.

Fungsi :

- a. Penyusunan dibidang masing-masing
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang

Uraian Tugas :

- a. Pengolahan pengawasan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan, perizinan serta melestarikan dan konservasi di bidang kelautan dan perikanan.
- b. Melakukan evaluasi, mengendalikan serta pengawasan standar mutu hasil perikanan.

- c. Perencanaan dan melakukan pengawasan dan mengendalikan usaha perikanan dan kelautan.
- d. Perencanaan dan melakukan pengelolaan perizinan pada usaha perikanan dan kelautan.
- e. Merencanakan dan melakukan pelestarian dan konservasi terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.
- f. Melakukan koordinasi dengan SKPD/instansi terkait, relevansinya dengan kewenangan bidang.

Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan :

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengawasan dan memberikan perizinan

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.

Uraian Tugas :

- a. Pengolahan pengawasan terhadap manfaat sumberdaya kelautan perikanan yaitu: ilegal fishing, pengelolaan ketidak ramahan

lingkungan, standar menggunakan alat tangkap, penyaluran dan pengangkutan hasil laut, pengawasan sumberdaya non hayati dan pencemaran laut.

- b. Mengidentifikasi dan analisis kesalahan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta pencatatan hukum bidang kelautan dan perikanan.
- c. Melaksanakan pembinaan, mengendalikan serta mengawasi standar mutu hasil perikanan
- d. Menyalurkan pengembangan jaringan investasi dan usaha serta pemasaran Hasil perikanan.
- e. Melaksanakan pola pelaksanaan dan Sistem pengawasan masyarakat (SISWAMAS) dalam mengelolah sumber daya laut dan perikanan.
- f. Mengelola perizinan dalam bidang kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan kelautan.
- g. Penyusunan rekomendasi hasil pengamatan dan perizinan sebagai perencanaan tindak lanjut.

Kepala Seksi Pelestarian dan Konservasi :

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pelestarian dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi

- c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas :

- a. Mengelola inventarisasi sumber daya potensial dan benda berharga serta rehabilitasi kawasan konservasi laut.
- b. Membuat identifikasi dan inventarisasi laut, kekayaan laut hayati dan non hayati.
- c. Mengelolah pengembangan dan pemanfaatan potensi taman laut, bahari.
- e. Melakukan kegiatan pelestarian dan konservasi terhadap laut, kekayaan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Memiliki tugas dan fungsi operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya masing–masing yang meliputi pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan.

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang kelautan dan perikanan sesuai keahlian.

Visi dan Misi

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur visi Dinas Kelautan dan Perikanan tidak terlepas dari Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur 2016-2021 yaitu:

Visi

Keberlanjutan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik Luwu Timur Terkemuka

Misi

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintah dan layanan publik yang sebaik-baiknya;
2. Mempererat persaingan dan keterbatasan sumber daya manusia di daerah untuk dapat menjadi yang lebih baik.
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumberdaya dan di dukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya.
4. Mendorong pembaharuan birokrasi untuk tata kelolah pemerintahan yang baik.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Luwu Timur diatas maka Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur yaitu“Peningkatan produksi perikanan berkualitas dan berdaya saing tinggi menuju Luwu Timur termuka 2021”. Hal tersebut sebagai kelanjutan dari visi misi Agroindustri yang telah direncanakan dalam waktu kepemimpinan di Bumi Batara Guru. Kebijakan pembangunan yang merata keseluruh pelosok desa dengan sistem Pembangunan

Desa Mengepung Kota telah memberikan dampak yang sangat besar dalam menciptakan sentra-sentra produksi dan mempermudah akses/transportasi kelokasi produksi.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat pesisir Luwu Timur khususnya di desa Bawalipu Kecamatan Wotu.

1. Wawancara dengan informan 1

Nama : Anthon Saranga

Pekerjaan : Kepala bidang perikanan tangkap dan kelautan dinas kelautan perikanan dan pangan Luwu Timur

Peran pemerintah sangat berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, namun hal ini dalam bidang perikanan dan tangkap pemerintah melihat potensi alam yang ada disekitar masyarakat ini kemudian mengambil suatu keputusan atau hal apa saja yang akan di lakukan kedepanya, seperti yang Bapak Anthon Saranga katakan.

“Pada dasarnya masyarakat pesisir memiliki dua karakter Budidaya yaitu budidaya sektor penangkapan ikan dan budidaya pengembangan wisata bahari atau pengelolaan mangrove, dimana pemerintah daerah berperan penting dalam pengembangan sumber daya alam ini agar lebih bermanfaat dan manffatnya bukan hanya untuk pemerintah tapi untuk masyarakat juga tentunya”²

Selain pengembangan sumber daya alam pemerintah juga mengidentifikasi kebutuhan masyarakat pesisir

² Anthon Saranga, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan, “Wawancara” Dinas kelautan Perikanan dan Pangan Luwu Timur, Malili, tgl 29 Mei 2019

“kami sebagai sambung tangan pemerintah melakukan identifikasi terhadap masyarakat pesisir menambah pengetahuan atau pola pikir yang di ubah untuk melakukan usaha yang meningkatkan taraf hidup, seperti bagaimana merencanakan usaha yang baik, mengerti perencanaan usaha yang baik, serta menejamen pengelolaan suatu usaha”³

Daerah pesisir Wotu merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang masih banyak belum dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir karena keterbatasan pengetahuan, oleh karena itu wilayah pesisir itu sangat membutuhkan campur tangan pemerintah agar kehidupan masyarakat di kecamatan Wotu masuk dalam kategori sejahtera.

Adapun kebijakan pemerintah daerah terhadap masyarakat pesisir di Kecamatan Wotu :

“ada beberapa kebijakan yang pemerintah keluarkan yaitu mengembangkan program kegiatan, pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk usaha penangkapan hasil laut, melakukan penyuluhan atau musrembang desa tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan pesisir, melakukan pembinaan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka pengelolaan usaha dan manajemen usaha kelompok nelayan, mengemangkan sarana dan prasarana perumahan nelayan dan kebutuhan pokok”.⁴

Untuk mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat pesisir di kecamatan Wotu tentu bukan hal yang mudah bagi pemerintah daerah Luwu timur, dengan kaya lain ada berbagai masalah dan kendala yaitu:

“kendala yang di hadapi pemerintah untuk mengembangkan daerah pesisir dan masyarakat pesisir yaitu kurangnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat

³ Anthon Saranga, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan, “Wawancara” Dinas kelautan Perikanan dan Pangan Luwu Timur, Malili, tgl 29 Mei 2019

⁴ Anthon Saranga, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan, “Wawancara” Dinas kelautan Perikanan dan Pangan Luwu Timur, Malili, tgl 29 Mei 2019

pesisir karena keterbatasan pengetahuan atau pendidikan sehingga keterampilannya dalam mengolah sumber daya masih sangat kurang, kesadaran masyarakat pesisir untuk menjaga kelestarian lingkungan laut seperti tidak membuang sampah sembarangan dan merusak terumbu karang yang ada disekitar pesisir Wotu.⁵

Bagaimana perkembangan pendapatan masyarakat pesisir diKecamatan Wotu sebelum adanya bantuan dari pemerintah daerah Luwu Timur:

“terkait pendapatan sangat minim, bisa di bilang di bawa standar tidak termasuk upah minimum regional, setelah adanya bantuan pemerintah penghasilan masyarakat pesisir di atas standar kisaran RP 3.500.000 sampai dengan 3.800.000”.⁶

2. Wawancara dengan informan 2

Nama : Satya Yulianty Karini

Pekerjaan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Luwu Timur

Adapun upaya Pemerintah Luwu Timur yang telah dilakukan kepada Masyarakat Pesisir di Kecamatan Wotu yaitu

“melakukan usaha tambak ikan bandeng atau biasa di sebut empang, serta dukungan untuk bertani rumput laut nah di sini kita kasi bantuan seperti pupuk ikan bandeng atau ikan bolu sejalan dengan program pemerintah kita juga melakukan penyuluhan tentang pembuatan pupuk, untuk rumput lautnya di kasi tali, pelampung yang dari gabus dan modal usaha kerja sama antara bank dan koperasi .⁷

Apa saja kendala yang di hadapi Pemerintah daerah Luwu Timur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Wotu :

⁵ Anthon Saranga, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan, “Wawancara” Dinas kelautan Perikanan dan Pangan Luwu Timur, Malili, tgl 29 Mei 2019

⁶ Anthon Saranga, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan, “Wawancara” Dinas kelautan Perikanan dan Pangan Luwu Timur, Malili, tgl 29 Mei 2019

⁷ Satya Yulianti Karini, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, “Wawancara” Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Luwu Timur, tgl 29 Mei 2019

“disini yang masih jadi kendalanya seperti pendataan, belum bisa dipastikan semuanya meskipun ada kelompok penyuluh tapi pendataan belum maksimal, sumber daya manusia yang masih kurang, serta sarana dan prasarana yang masih belum maksimal tetapi infrastruktur jalan produksi hasil laut sudah bagus dan jembatan beton juga sudah terpenuhi untuk semua kecamatan karena pembagunan sangat di prioritaskan”.⁸

Adapun anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk daerah pesisir yaitu:

“Untuk anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk daerah pesisir Luwu Timur untuk daerah pesisir kalau untuk program kegiatan bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan sekitar 3 milyar dan untuk budidaya air payau dan budidaya laut bagi petani pembudidaya sekitar 4 milyar”.⁹

3. Wawancara dengan informan 3

Nama : Solihin B kaniyu

Pekerjaan : Kepala Desa Bawalipu

kita tidak dapat pungkiri dan memahami dengan jelas bahwa program ini hanya bisa berhasil jika mendapat respon dan perhatian dari masyarakat itu sendiri.

Seperti yang dikemukakan oleh Ustad Solihin B Kaniyu selaku Kepala Desa Bawalipu yang mengatakan bahwa:

“Kalau saya lihat selama ini jika ada sosialisasi ataupun pelatihan-pelatihan baik yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta, masyarakat sangat antusias mengikuti pelatihan tersebut karena kegiatan ini selain dapat menambah pengetahuan juga dapat mengisi kekosongan karena kegiatan ini dilaksanakan pada jam-jam yang tidak mengganggu pekerjaan ataupun istirahat para masyarakat, atau biasa juga sudah diumumkan memang pagi-pagi sebelumnya supaya masyarakat tahu kalau akan diadakan kegiatan”.¹⁰

⁸Satya Yulianti Karini, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, “Wawancara” Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Luwu Timur, tgl 29 Mei 2019

⁹Satya Yulianti Karini, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, “Wawancara” Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Luwu Timur, tgl 29 Mei 2019

¹⁰Solihin B Kaniyu, Kepala Desa Bawalipu, “Wawancara” Kantor Desa Bawalipu, tgl 28 Mei 2019

4. Wawancara dengan informan ke 4

Nama : Rahmat

Pekerjaan : Ketua RT

masyarakat pesisir dimana mereka masih mempercayai adat istiadat dan budaya yang turun temurun dari nenek moyangnya.

“kita disini sebagai masyarakat yang tinggal dipinggir laut sangat percaya dengan apa yang di bilang abala,itu abala artinya celaka, contohnya itu disini dibangun pelabuahn yang dikasi lebar jalanya,baru dibangun juga tempat wisata yang dibidang banua pangka ini juga umum tempatnya yang jadi masalahnya juga masyarakat itu orang yang datang ditempat wisata bukan cuman suami istri tapi banyak juga orang pacaran na yang ditakutkan ini hal-hal yang tidak diinginkan nanti na kerja. Sedangkan masyarakat disini percaya kalau dikasi kotor-kotor kampung, seperti nelayan yang cari ikan na percaya ikan yang na dapat nanti sedikit atau bisa jadi tidak ada nadapat”.¹¹

5. Wawancara dengan informan 5

Nama : Asiar

Pekerjaan : Nelayan

Bapak Asiar salah satu masyarakat pesisir yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana

“alahamdulillah bukanji janji pemerintah na bilang mau ki nakasi mesin bala-bala ada mi beberapa kelompok dapat mesin, biar sedikit yang dapat tapi membantu sekali untuk kita ini pa rumput laut, tali rumput laut juga ada na kasiki”

Sosialisasi pemerintah daerah yang dikemukakanoleh salah satu Masyarakat Pesisir

“Sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan didesa kami ini seperti pelatihan simulasi bencana alam, tentang pelatihan mengelola bibit rumput laut juga ada, tentang kesehatan juga ada, untuk anak sekolah juga ada

¹¹Rahmat, Pak RT 01, “Wawancara”, Dusun Salualla, tgl 30 Mei 2019

dan banyakpi lagi. Kalau partisipasi masyarakat saya liat dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang tua itu biasa banyak yang datang apalagi kalau untuk perempuan, itu ibu-ibu dirumah biasa cepat-cepat kerja pekerjaan rumahnya supaya bisa ikut dalam kegiatan itu. Kami disini kalau masalah ikut berpartisipasi dek ya kami sangat senang, karena itu kegiatan berguna tongji untuk kita sendiri supaya bertambah juga pengetahuanta”¹²

C. Pembahasan

1. Upaya Pemerintah Daerah Luwu Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di kecamatan Wotu

Kemajuan suatu daerah bergantung pada potensi alam yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, dimana potensi alam tersebut dapat di kelolah oleh masyarakat itu sendiri. Besarnya ketimpangan sosial yang terjadi diberbagai daerah khususnya daerah pesisir pantai karena kurangnya perhatian pemerintah daerah sehingga masyarakatnya mengalami keterbatasan hidup atau kemiskinan.

Kemiskinan bersumber pada lemahnya potensi manusia dan kurangnya dukungan lingkungan dalam memanfaatkan potensi alam dan sumberdaya yang tersedia. Untuk memecahkan masalah diatas tentu perlunya tindakan pemerintah daerah dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pada dasarnya kemiskinan merupakan suatu masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensional, yang sangat berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan dapat ditinjau dari rendahnya tingkat pendapatan atau penghasilan seseorang, keterisolasian, keterbelakangan,

¹²Asiar, Masyarakat pesisir, “Wawancara” Desa Bawalipu, tgl 30 Mei 2019

dan pengangguran, yang selanjutnya meningkat menjadi ketimpangan antar daerah, antar sektor dan antarmasyarakat.¹³

Dengan keadaan tersebut tentu perlu adanya perhatian lebih pemerintah daerah untuk peningkatan dan mensejahterakan masyarakatnya dengan melihat sedikit daerah yang tidak tertangani langsung oleh pemerintah daerah ada separuh bidang yang harus menyangkut tenaga kerja secara meningkat dengan tingkat pendapatan yang rendah dan ada juga separuh masyarakat yang tidak ikut serta dalam cara pembangunan sehingga tidak dapat merasakan hasilnya secara maksimal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur, jumlah penduduk diwilayah pesisir di Desa Bawalipu sebanyak 170 kepala keluarga yang mendiami wilayah tersebut. Tidak sedikit bahkan sebagian besar dari penduduk tersebut dapat dikategorikan sebagai penduduk kurang mampu.

Kurangnya informasi tentang

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kurangnya keterampilan merupakan penyebab yang mempengaruhi lemahnya potensi sumber daya dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan sosialnya. Kondisi sosial budaya masyarakat tidak selalu didukung oleh meningkatnya kelebihan masyarakatnya, adakalanya memperlambat kemajuan masyarakat itu sendiri. Dilain sisi hadirnya masyarakat, alam dan lingkungan sosial merupakan kelebihan yang sangat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Penanggulangan kemiskinan dengan jalan pemberian bantuan kebutuhan hidup

¹³ Sumodiningrat, gunawan *“Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial”* (jakarta:Gramedia)

seketika bukanlah upaya pemecahan masalah, namun hanya merupakan bantuan sementara. Kelengkapan penunjang yang diperlukan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir meliputi sumber dana, ilmu pengetahuan, teknologi, sarana dan prasarana yang kesemuanya itu dapat digali dan diperoleh dari pemerintah, instansi atau lembaga non pemerintah dan masyarakat.

Dalam bidang perikanan tangkap dalam hal pemberdayaan melihat dari potensi alam yang dimiliki masyarakat pesisir yang ada di daerah luwu timur.

a) Budidaya sektor penangkapan ikan

Dalam hal ini budidaya dan sektor penangkapan ikan di kecamatan wotu diperbolehkan oleh pemerintah setempat dengan bertujuan mengembangkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dengan melihat potensi yang ada disekitarnya dengan salah satu jalanya membolehkan menangkap ikan dilaut dengan aturan tertentu dari pemerintah daerah, seperti dilarang menangkap ikan dengan bom dan pukat listrik agar ekosistem terumbu karang tidak rusak dan kelestarian laut tetap terjaga, seperti laut yang ada dipelabuhan wotu masyarakat disana masih menggunakan cara tradisional yaitu menangkap ikan dengan pukat atau bahasa daerahnya *belleseiring* dengan berkembangnya zaman moderen tidak begitu banyak masyarakat menggunakan cara ini, ada cara lain juga yang di mana masyarakat menggunakan jaring pukat yang lebih besar dan menggunakan mesin untuk mengangkat pukat tersebut dari dasar laut. Dengan cara ini pendapatan masyarakat meningkat dan tenaga yang dikeluarkan hanya sedikit.

b) Pengembangan Wisata Bahari (Mangrove)

Mangrove merupakan tumbuhan yang hidup disekitaran pesisir pantai yang berfungsi sebagai tempat ikan dan hewan lainnya yang hidup dilaut berkembang biak dan berlindung.

Untuk mangrove diwilayah pesisir wotu yang dulunya hanya sebagai pajangan dan penahan ombak laut yang tidak di manfaatkan masyarakat, kini telah menjadi perhatian anak muda atau remaja yang diwotu untuk di manfaatkan sebagai tempat wisata yang dibentuk pada pertengahan tahun 2017 dan digunakan pada akhir tahun 2017.

Tentu dengan ide kreatif para pemuda wotu dan diiringi dukungan dari pemerintah daerah juga ikut serta mendukung dari segi material, sehingga bukan saja masyarakat yang menikmati tempat ini namun pemerintah juga ikut merasakan dampak positifnya, dan tentunya tidak merusak kelestarian alam yang ada disekitar pesisir. Tempat ini juga menjadi sumber pendapatan sebagian masyarakat yang ada disana khususnya para ibu rumah tangga yang memanfaatkan tempat wisata itu dengan membuka usaha kecil-kecilan dengan berdagang disekitaran tempat wisata, dan alhamdulillah pengunjung yang datang juga memanfaatkan tempat itu untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan.

Selanjutnya pemerintah daerah luwu timur menyiapkan berbagai sarana seperti yang dikatakan bapak Anthon Saranga saat wawancara.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pemerintah daerah merupakan fasilitator yang menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat dalam setiap program yang dikeluarkan oleh pemerintah.

1) Perahu nelayan

Salah satu sarana yang diberikan pemerintah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, dimana masyarakat pesisir ini bisa menggunakannya saat mencari ikan di laut dan memanfaatkannya pula untuk budidaya rumput laut.

2) Alat tangkap

Alat tangkap yang dimaksud berupa alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan, kepiting dan udang. Dimana alat tangkap ini juga di berikan langsung pemerintah daerah untuk lebih mempermudah lagi masyarakat pesisir dalam mencari nafkah untuk menambah hasil pendapatan sehingga masyarakat pesisir wotu jauh dari kata kemiskinan. Pemerintah dengan berbagai usaha, cara dan jalan yang telah ditempuh untuk mensejahterakan rakyatnya.

3) Teknologi

Seiring dengan perkembangan zaman tentunya pemerintah juga memiliki cara tersendiri untuk mengembangkan program kerjanya, dimana melakukan penyuluhan atau musrembang desa yang adakan untuk mengembangkan pemahaman serta mendengarkan masukan atau keluhan masyarakat pesisir, serta kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi.

Sebelum melangkah lebih jauh pemerintah daerah melakukan identifikasi terhadap masyarakat pesisir wotu apa saja yang dibutuhkan masyarakat, memberikan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan.

Seperti hasil wawancara diatas pemerintah daerah membuat suatu program dimana masyarakat pesisir ini membentuk suatu kelompok, dimana kelompok ini terdiri dari masyarakat pesisir yang nantinya akan diberikan bantuan apa saja

yang mereka perlukan untuk menunjang meningkatnya pendapatan mereka, sebelum itu berlangsung tentunya pemerintah daerah mengeluarkan beberapa strategi yaitu:

- a) Mengembangkan program kegiatan, pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk usaha penangkapan hasil laut
- b) Memberikan penyuluhan tentang pentingnya upaya kelompok dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan pesisir.
- c) Melakukan pembinaan penangkapan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka pengelolaan usaha dan manajemen usaha kelompok nelayan.
- d) Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan nelayan dan kebutuhan pokok.

2. Pemberian bantuan sarana dan prasarana

Berkaitan dengan hal yang diatas tentu pemerintah daerah sangat memperhatikan infrastruktur setiap daerah yang dimana sangat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, dilakukan dengan melakukan program yang dapat mendorong pertambahan produksi atau hasil tangkap nelayan dengan memberikan akses terhadap fasilitas, peralatan, pelatihan dan modal.

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Luwu Timur bahwa untuk mendukung pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan Daerah Luwu Timur telah membangun sarana dan prasarana penunjang yang memadai di Kecamatan Wotu Desa Bawalipu yaitu:

Seperti halnya di Kecamatan Wotu, sudah terpenuhi sarana dan prasarananya yaitu:

1. Sarana Prasarana Penunjang Transportasi

Fasilitas Transportasi yang dibangun sebagai berikut:

- a) Fasilitas Transportasi darat, meliputi jalan dan jembatan dengan konstruksi aspal dan beton,
- b) Fasilitas Transportasi laut/air, meliputi, pelabuhan atau dermaga.

2. Sarana Prasarana Penunjang Produksi

Fasilitas Pelabuhan Perikanan:

Fasilitas pelabuhan diKecamatan Wotu Desa Bawalipu yaitu:

- a) Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tempat Pelelangan ikan Wotu (TPI Wotu) terletak didesa Bawalipu Kecamatan Wotu dan telah difungsikan dengang baik. Kompleks TPI Wotu telah .dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang dan senantiasa dikembangkan secara berkelanjutan antara lain: Dermaga dan Bangsal pelelangan ikan.

- b) Pabrik Es

Fasilitas pabrik es diKabupaten Luwu Timur sebanyak 2 tetapi terkhusus dikecamatan wotu yang berlokasi didesa bawalipu merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam peningkatan mutu dan kualitas hasil perikanan.

3. Partisipasi masyarakat

Bahwa yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir wotu. Sebagaimana mekanisme kerja yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa pola partisipasi masyarakat memang sangat dominan dalam semua tahap kegiatan program pemberdayaan masyarakat pesisir ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi. Dapat dilihat dari banyaknya kelompok usaha yang dibentuk oleh pemerintah setempat untuk para masyarakat yang ada di setiap desa yang ada di Kecamatan Wotu. Oleh karena itu kita tidak dapat pungkiri dan memahami dengan jelas bahwa program ini hanya bisa berhasil jika mendapat respon dan perhatian dari masyarakat itu sendiri.

Seperti yang dikemukakan oleh Ustad Solihin B Kaniyu selaku Kepala Desa Bawalipu yang mengatakan bahwa:

Dari hasil wawancara diatas terlihat jelas bahwa memang di desa bawalipu ini sangat didukung oleh partisipasi masyarakatnya, melihat semua kegiatan yang telah dilaksanakan, baik oleh pemerintah daerah maupun swasta disambut baik dan masyarakatnya sangat antusias untuk turut serta meramaikan dan mengikuti pelatihan. Hal ini sangat mendukung program-program yang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir khususnya di desa bawalipu Kecamatan Wotu.

4. Kondisi sarana dan prasarana

Keberadaan sarana dan prasarana di desa Bawalipu Kecamatan Wotu merupakan salah satu modal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

suatu Dinas sehingga dengan adanya sarana dan prasarana tersebut tujuan peningkatan pendapatan masyarakat maupun kegiatan lainnya dapat terlaksana secara optimal dan memberikan berbagai kemudahan dan dukungan kebijakan agar program pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan sehingga dapat menunjang keberhasilan pembangunan didesa Bawalipu Kecamatan Wotu.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa kondisi sarana prasarana didesa bawalipu ini cukup memadai karena telah banyak pembangunan-pembangunan serta pemerdayaan yang telah dilakukan dari segi perbaikan sarana prasarana setiap tahunnya meskipun belum sepenuhnya digunakan atau diberdayai tapi upaya pemerintah daerah cukup diacungi jempol karena memang dari tahun ke tahun Desa ini jika diperhatikan telah mengalami perkembangan.

3. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pesisir

a. Keterbatasan anggaran

Anggaran merupakan faktor penting dalam pengembangan dan peningkatan suatu daerah khususnya wilayah pesisir dikarenakan anggaran merupakan unsur bergerakanya seluruh elemen dari sebuah kelembagaan pemerintahan. Dalam pelaksanaan pemberian modal dan usaha kelompok masyarakat nelayan dan kelompok masyarakat lainnya ini sangat diperlukan anggaran yang tidak sedikit, agar semua masyarakat yang memang wajib dan berhak mendapatkan bantuan itu semuanya bisa menerima bantuan itu.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam menjalankan suatu program pemerintah daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit mengingat jumlah kecamatan yang ada di luwu timur yaitu sebelas kkecamatan yang dimana sebagian besarnya masuk daerah pesisir dan penduduk yang cukup banyak. Dengan demikian seperti yang terjadi dimasyarakat , ada yang kontra dengan pemberian bantuan modal usaha (dana) karena merasa bantuan ini tidak secara merata itu tidak terulang lagi. Karena sejatinya program pemerintah ini brtujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun hal tersebut bukanlah faktor kesengajaan melainkan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah tetapi pemerintah tetap berusaha agar pemberian bantuan itu dapat secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan.

b. Nilai Religius

Tidak diragukan lagi bahwa agama dan kepercayaan memiliki peran penting dalam kehidupan umat manusia, begitupu dengan masyrakat pesisir dimana mereka masih mempercayai adat istiadat dan budaya yang turun temurun dari nenek moyanngya.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa nilai religius masyarakat pesisir memang masih sangat dipercaya, hal ini tentunya di hargai sebagai masyarakat yang memang memilki pandangan berbeda dengan masyarakat yang tinggal di kota besar. Dengan hal ini pemerintah juga mengerti serta memahami maksud dari masyarakat, serta dalam pembangunan daerah tentu pemerintah bermusyawarah langsung dengan masyarakat pesisir bagaimana baiknya agar program pembangunan pemerintah juga berjalan dengan baik.

c. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu faktor penghambat program kerja pemerintah daerah yaitu kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal ini yang dimaksud adalah para pelaku atau masyarakat pesisir itu sendiri dalam penerapan metode dan teknologi budidaya maupun penangkapan .

Perkembangan masyarakat pesisir seperti didesa Bawalipu Kecamatan Wotu masih belum sebagus masyarakat yang tinggal diperkotaan. Hal ini bisa dilihat dengan masih kurangnya infrastruktur yang ada diwilyah pesisir dan juga pengetahuan, pemahaman teknologi serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir begitu minim.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia didesa Bawalipu dikarenakan kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat. Fakta tersebut tentunya meprihatinkan. Mengingat masyarakat yang ada di Desa Bawalipu sangat dekat dengan sumber daya Hayati yang ada di laut. Namun dengan potensi kelautan dan perikanan yang selalam ini ada, ternyata masih belum bisa mensejahterakan masyarakat pesisir. Maka dari itu sangat diperlukan membimbing kelompok nelayan maupun membimbing kelompok lainya sehingga mewujudkan sumber daya manusia yang berkuaitas melalui peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan sosial, politik, dan budaya dapat mampu dan dapat menjangkau akses sumber daya alam, keuangan, teknologi, dan pasar sehingga sangat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan serta politik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian ini dan hasil pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, sebagai initsari dari penelitian yang penulis lakukan. Adapun kesmpulan dari penelitian ini adalah:

1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Pengembangan potensi perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Luwu Timur melalui Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil perikanan dan kelautan guna untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus pendapatan masyarakat Desa Bawalipu Kecamatan Wotu. Dengan dukungan sarana dan prasarana dapat meningkatkan hasil produksi dan dapat mendorong dan mengembangkan kondisi perekonomian masyarakat pesisir.

2. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir

Adapun beberapa kendala dari hasil penelitian dapat di lihat dari hasil wawancara terbatasnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan masih kurangnya sumber daya manusia, yang dimana masyarakat sangat membutuhkan pengetahuan serta pemahaman dalam mengelolah sumber daya alam dengan kemandirian masyarakat itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dari beberapa wawancara dan observasi yang telah dilakukan, ada beberapa sarana yang nantinya bisa menjadi rekomendasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu sebagai berikut:

1. Pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat pesisir atau nelayan dari hasil penelitian ini lebih banyak ditujukan kepada peningkatan kemampuan dan keterampilan namun juga harus diperhatikan terkait bagaimana masyarakat pesisir ini mampu manajemen keuangan sehingga mampu untuk mandiri dan memiliki kemampuan mengajukan bantuan kredit usaha ke bank.
2. Perlu diperhatikanya kendala-kendala yang menghambat proses peningkatan hasil pendapatan masyarakat sehingga bisa menjadi acuan dalam program pemerintahan bserikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran Dan Terjemahnya*”, (Jakarta, Pustaka Amina Jakarta: 2005)

BUKU

BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003) h. 230

Bungin. Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Chalid, Nursiah dan Yusbar Yusuf. 2014. *Pengaruh Tingkat Kemiskinan, tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau*. Jurnal Ekonomi Universitas Riau

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 185

Purba, J. 2002 *Pengelolaan Lingkungan Sosial : Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 185

Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996), h. 145

Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 77-78

Kamus Etimologi Bahasa Indonesia, (Semarang: Dahara Prize, 1990), h. 177

Kusnardi, Moch. Dan Saragih, R. Bintan, 2008, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Lewaherilla, N., E. 2002. *Pariwisata Bahari Sebagai; Pemanfaatan Potensi Wilayah Pesisir dan Lautan*.

Pradnya Paramita “Tata Kehidupan Bernegara” (Jakarta, Balai Pustaka: 1986).

Prianto, E. 2005. *Prosiding “Fenomena Aktual Tema Doktorat Arsitektur dan perkotaan”*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Purwadarminta, W.J.S. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

RS. Subandi, M.M., *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 133-134.

Reddy Zaky Oktama, *Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Pendidikan Anak Keluarga Nelayan*, Op, Cit. h. 12.

- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Refika Aditama, 2005
- Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta: CV Citra Utama 2005)
- Suprijanto, I 2006, *“Karakteristik Spesifik, Permasalahan dan Potensi pengembangan kawasan Kota Tepi Laut/Pantai (Coastal City) di Indonesia*.
- Supriharyono 2007, *“Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sumodiningrat, gunawan *“Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial”* (Jakarta: Gramedia)
- Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta: CV Citra Utama 2005)
- Suryono Agus. 2014. *“Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat”*. Universitas Brawijaya
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia Bab 1 Pasal .
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yeni Kuntari, *“Kajian Multi Disiplin ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat”*. (cet. 1; STIE Widya Manggala Semarang, 2017)
- Zubaedi, Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), h.42

JURNAL

- Aliza Noor Fathoni *“Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan Studi Kasus pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap”* jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Purwokerto, 2015
- Bengen, D.G. 2001. *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya daya Alam Pesisir dan Laut* . Pusat Kajian Sumberdaya Pasisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor. Persada. Jakarta
- Riswanda Immawan, *Dampak Pembangunan nasional terhadap Peningkatan Kemampuan Daerah* Laporan Penelitian PAU Studi Sosial UGM Yogyakarta. 1991.

Sarjulis *"Kehidupan sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam"* jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Andalas, 2011

Zulfiani, *"Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar"* jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, 2015

NARASUMBER

Anthon Saranga, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan, *"Wawancara"* Dinas kelautan Perikanan dan Pangan Luwu Timur, Malili, tgl 29 Mei 2019

Asiar, Masyarakat pesisir, *"Wawancara"* Desa Bawalipu, tgl 30 Mei 2019

Rahmat, Pak RT 01, *"Wawancara"* Dusun Salualla, tgl 30 Mei 2019

Solihin B Kaniyu, Kepala Desa Bawalipu, *"Wawancara"* Kantor Desa Bawalipu, tgl 28 Mei 2019

Satya Yulianti Karini, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, *"Wawancara"* Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Luwu Timur, Malili tgl 29 Mei 2019

INTERNET

[https://core.ac.uk/peran Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru.](https://core.ac.uk/peran%20Dinas%20Kelautan%20dan%20Perikanan%20Dalam%20Peningkatan%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20Kabupaten%20Barru)

<http://news.kkp.go.id/index.php/meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat-pesisir/>

<http://www.materibelajar.id/2016/01/konsep-upaya-definisi-pemerintah.html#>

RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021, h.23

***L
A
M
P
I
R
A
N***

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rista biasa dipanggil Itta lahir di Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Juli 1997. Anak ke-Dua dari Empat bersaudara dari pasangan ayahanda Abd. Rahman dan ibunda Patiama. Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal pada tahun 2003 di SDN 133 Banalara dan tamat pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ditingkat SMP, tepatnya di SMP Negeri 1 Wotu dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ditingkat SMA, tepatnya di SMA Negeri 2 Luwu Timur dan dinyatakan lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan di **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo**, dengan Program Studi Ekonomi Syariah (EKIS) fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Berbagai macam rintangan yang dihadapi di Perguruan Tinggi tidak menyurutkan langkahnya untuk terus aktif dan mengikuti perkuliahan dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2019. Selama kuliah penulis pernah mengikuti organisasi Ekstra atau organda yaitu Ham Lutim Batara Guru sebagai salah satu anggota dibidang keperempunan dengan masa bakti 2018-2019.

Seiring dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya aktivitas yang padat diperkuliahan dan organisasi, namun penulis berhasil menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul *Upaya Pemerintah daerah (Pemda) Luwu Timur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Study Kasus Masyarakat Pesisir di Kecamatan Wotu)* sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan jenjang program Strata Satu (S1) Ekonomi.